



BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

Sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, disebutkan bahwa LPPD disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara menyusun LPPD Tahun 2018 yang disampaikan kepada Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara untuk digunakan sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LPPD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Program dan Kegiatan
3. BAB III Pelaksanaan Tugas Pembantuan
4. BAB IV Tugas Umum Pemerintahan
5. BAB V Penutup



Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPD kepada Masyarakat;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No 517 Tahun 2010);
- 6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;
- 7) Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
- 8) Peraturan Daerah No.5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 05 Norek Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara: 5/237/2016).



- 9) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);
- 10) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi B/2107/M.PAN-RB/6/2013 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kalimantan Utara;
- 11) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2423/SJ Tanggal 10 Mei 2013 perihal Rekomendasi Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

2. Gambaran Umum

a. Struktur Organisasi

Dinas Sosial di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Saat ini Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara terletak di Jl. Sengkawit Rt 97/36, sebelum berdiri sendiri mulai Januari tahun 2017 Dinas Sosial bergabung dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertempat di Jl. Katamso No 36 Tanjung Selor.

1) Tugas

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara



Nomor 21 Tahun 2016 yaitu melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang taman makam pahlawan;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Secara struktural Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Bidang dan membawahi 1 UPTD yaitu Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Marga Rahayu.



1) Dinas Sosial

Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No. 21 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a) Seksi Rehabilitasi Sosial
 - b) Seksi Perlindungan Jaminan Sosial
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi :
 - a) Seksi Pemberdayaan Sosial
 - b) Seksi Penanganan Fakir Miskin
5. Unit Pelaksana Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional



Tabel 1.1.

Uraian Jabatan dan Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

Jabatan	Tugas Pokok
Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan program kerja Dinas Sosial berdasarkan rencana kerja dinas agar dihasilkan dokumen program kerja yang tepat dan aplikatif. b. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan rencana kerja dinas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. c. Membina kinerja Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan lancar. d. Mengarahkan kinerja Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan lancar. e. Melaksanakan program kerja Bidang Sekretariat, Bidang- Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan rencana kerja dinas agar dihasilkan kinerja yang maksimal. f. Mengevaluasi program kerja Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. g. Melaporkan pelaksanaan program kerja Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan bidang Sekretariat sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. b. Membagi tugas pada Subbag. Perencanaan, Subbag Umum, dan Subbag Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik. c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Subbag. Perencanaan, Subbag Umum, dan Subbag Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik. d. Menyelia pelaksanaan kegiatan Subbag. Perencanaan, Subbag Umum, dan Subbag Keuangan sesuai dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. e. Melaksanakan Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (LPPD), baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. f. Melaksanakan Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Pelayanan Kepegawaian baik teknis maupun operasional sesuai



Jabatan	Tugas Pokok
	dengan peraturan yang berlaku.
	g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang sekretariat secara berkala agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang sekretariat.
	i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
Kepala Bidang Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	<p>a. Merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas Sosial agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.</p> <p>b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.</p> <p>c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.</p> <p>d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan Kebijakan Kepala Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.</p> <p>e. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial anak, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>f. Melaksanakan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>g. Melaksanakan Pelayanan Sosial Anak Balita serta Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>h. Melaksanakan Pelayanan Sosial Orang dengan HIV / AIDS (ODHA) dan Pelayanan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>i. Melaksanakan kegiatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Penanganan Korban Bencana Alam, Pemulihan dan Penguatan Sosial serta Kemitraan & Pengelolaan Logistik Bencana baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>j. Melaksanakan Kegiatan Pencegahan, Penanganan Korban Bencana Sosial, Politik dan Ekonomi, serta Pemulihan Sosial dan Reintegrasi Sosial baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>k. Melaksanakan Seleksi, Verifikasi, Terminasi dan Kemitraan Jaminan Sosial Keluarga serta Penyaluran Bantuan dan Pendampingan Jaminan Sosial Keluarga baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>l. Mengevaluasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>m. Membuat laporan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.</p> <p>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.</p>



Jabatan	Tugas Pokok
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kerja bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik. c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik. d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. e. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Pemberdayaan Sosial Keluarga, Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat, Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. f. Melaksanakan kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin Perkotaan, Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. h. Membuat laporan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Marga Rahayu

1) Tugas

UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

2) Fungsi

UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu mempunyai fungsi :

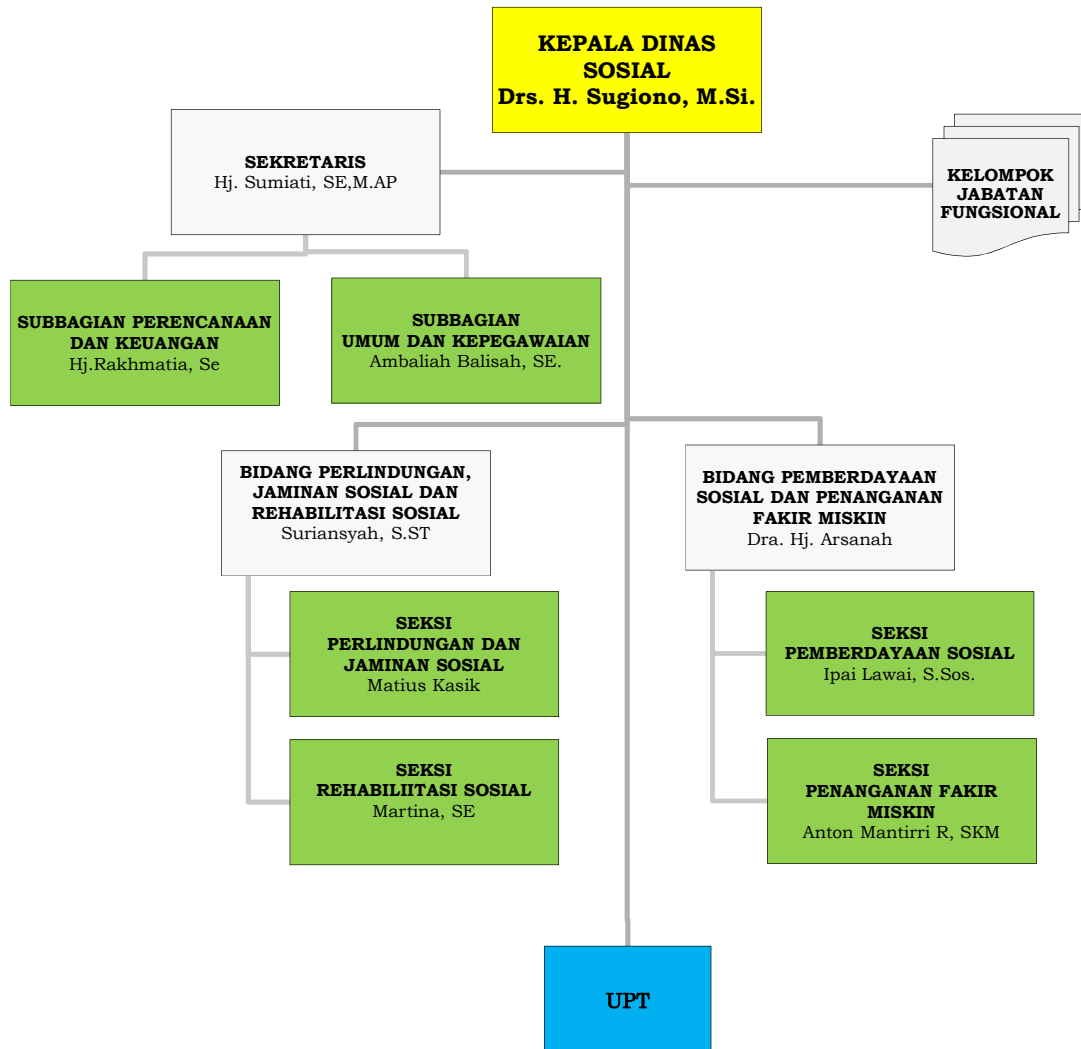
- a) Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;



- b) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
 - c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
 - d) Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e) Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- Susunan Organisasi PSTW Marga Rahayu terdiri dari :
- a) Kepala
 - b) Sub Bagian Tata Usaha
 - c) Seksi pembinaan sumber daya manusia dan penyaluran
 - d) Seksi Penyantun Dan Pelayanan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA

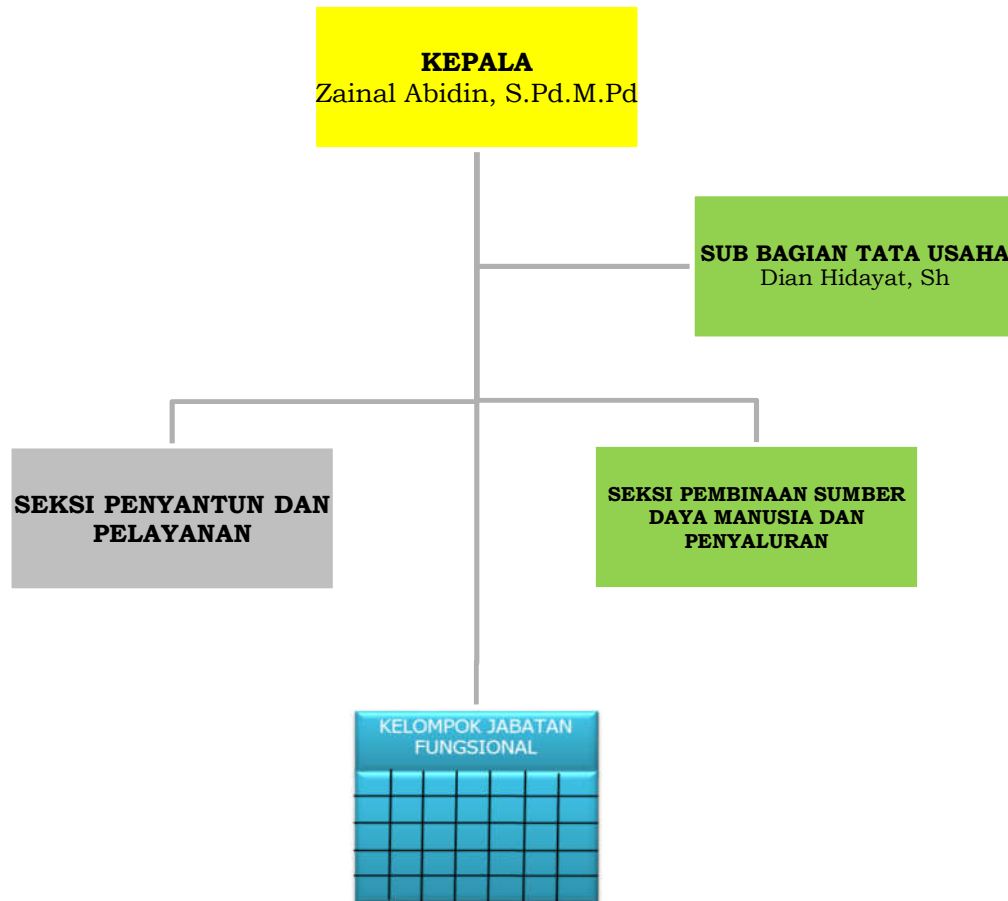


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Prov. Kaltara
Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No 21 Tahun 2016

Lampiran IV



STRUKTUR ORGANISASI UPTD PANTI SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga
Rahayu Tanjung Selor

Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No 21 Tahun
2016 Lampiran IV



b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD. Hingga sampai dengan 01 Desember Tahun 2018 jumlah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 36 Orang. Berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai tabel berikut:

1) Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial serta UPTD dengan latar belakang SD 0 Orang, SMP sebanyak 0 Orang, SLTA 8 Orang, D.III sebanyak 4 Orang, S.1 sebanyak 20 Orang, S.2 sebanyak 4 Orang.

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 01 Desember 2018.

Gender	Pendidikan										Jumlah
	SD	SMP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	
Pria			2			1		5	2		10
Wanita						2		11	1		14
Jumlah			2			3		16	3		24

Sumber: data kepegawaian Dinas Sosial Prov. Kaltara

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai UPTD Marga Rahayu berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 01 Desember 2018.

Gender	Pendidikan										Jumlah
	SD	SMP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	
Pria			2					3	1		6
Wanita			4			1		1			6
Jumlah			6			1		4			12

Sumber: data kepegawaian UPTD Marga Rahayu Prov. Kaltara



2) Berdasarkan Eselon

Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial serta UPTD yang menempati jabatan Eselon II a sebanyak 1 Orang, Eselon III a sebanyak 4 orang, Eselon IV sebanyak 8 orang, dan Non Eselon sebanyak 24 orang.

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Eselon Per 01 Desember 2018

Gender	Eselon						Jumlah
	I	II	III	IV	Jumlah	Non Eselon	
Pria		1	1	2	4	6	10
Wanita			2	4	6	8	14
Jumlah		1	3	6	10	14	24

Sumber: data kepegawaian dinsos Prov. Kaltara

Tabel 1.5 Komposisi Pegawai UPTD Marga Rahayu Berdasarkan Eselon Per 01 Desember 2018

Gender	Eselon						Jumlah
	I	II	III	IV	Jumlah	Non Eselon	
Pria			1	2	3	5	7
Wanita						5	5
Jumlah			1	2	3	10	12

Sumber: data kepegawaian UPTD Marga Rahayu Prov. Kaltara

3) Berdasarkan Golongan

Dari sejumlah 36 orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial serta UPTD yang menempati Golongan I sebanyak 0 orang, Golongan II sebanyak 10 orang, Golongan III sebanyak 21 orang, Golongan IV sebanyak 5 orang.

Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Per 01 Desember 2018

Gender	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pria	-	2	6	2	10
Wanita	-	2	10	2	14
Jumlah	-	4	16	4	24

Sumber: data kepegawaian Dinsos Prov. Kaltara



Tabel 1.7 Komposisi Pegawai UPTD Marga Rahayu Berdasarkan Golongan 01 Desember 2018

Gender	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pria	-	3	3	1	7
Wanita	-	3	2	-	5
Jumlah	-	6	5	1	12

Sumber: data kepegawaian UPTD Marga Rahayu Prov. Kaltara

4) Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak tetap dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD berjumlah 23 orang, dengan latar belakang pendidikan S1 10 orang D III sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 7 orang, SMP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 1 orang.

Tabel 1.8 Komposisi Tenaga Kerja Dinas Sosial Kontrak berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 01 Desember 2018.

Gender	Pendidikan								Jumlah	
	SD	SMP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1		S.2
Pria			1			1		3		5
Wanita			1			-		4		5
Jumlah			2			1		7		10

Sumber: data kepegawaian Dinas Sosial Prov. Kaltara

Tabel 1.9 Komposisi Tenaga Kerja Kontrak UPTD Marga Rahayu berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 01 Desember 2018.

Gender	Pendidikan									Jumlah
	SD	SMP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
Pria	-	1	2	-	-	2	-	2	-	7
Wanita	1	-	3	-	-	1	-	1	-	6
Jumlah	1	1	5	-	-	3	-	3	-	13

Sumber: data kepegawaian UPTD Marga Rahayu Prov. Kaltara



2.3 Sarana dan Prasarana

a. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas sosial Provinsi Kalimantan Utara meliputi peralatan kantor yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10. Daftar aset Dinas Sosial per tanggal 31 Desember 2018

No	Uraian/ Barang	Merk	Tahun Perolehan	Jml	Perolehan barang	Status barang	Kondisi barang
1	Mesin Ketik	Olimpia	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
2	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Filling Kabinet)	-	2018	2	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
3	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Arsip)	-	2018	4	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
4	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Brangkas)	Kafele	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
5	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Kayu)	-	2018	5	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
6	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Rak Koran)	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
7	Alat Kantor Lainnya (Alat Penghancur Kertas)	Dahle	2018	2	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
8	Alat Kantor Lainnya (GPS)	Garmin	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
9	Alat Pendingin (Lemari Es)	Samsung	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
10	Alat Pendingin (AC)	LG	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
11	Alat Rumah Tangga Lainnya (Televisi)	Samsung	2018	2	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
12	Alat Rumah Tangga Lainnya (Sarana Akses Bagi Disabilitas/ Pagar)	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
13	Komputer PC	HP	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik



14	Laptop	HP	2018	8	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
15	Printer	Epson	2018	4	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
16	Meja Kerja	-	2018	15	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
17	Meja Pejabat Eselon 2	Frontline	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
18	Meja Rapat	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
19	Kursi Kerja	-	2018	17	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
20	Kursi Tamu	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
21	Peralatan Studio Visual (Kamera)	Canon & Fujifilm	2018	2	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
22	Alat Komunikasi (Telephone)	Panasonic	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
23	Software (Website)	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
24	AC Central	Polytron & Gree	2018	2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Aset Dinas Sosial	Baik
25	AC Split	Samsung	2018	4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Aset Dinas Sosial	Baik
26	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Arsip)	-	2017	3	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
27	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Filling Kabinet)	-	2017	2	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
28	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Rak Piring)	-	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dispenser)	Sanken	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
30	Pengadaan Personal Komputer (Komputer)	Asus	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
		Asus	2017	4	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
31	Pengadaan Personal Komputer Laptop	Asus	2017	5	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
32	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (CCTV)		2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik



33	Peralatan Perlengkapan Kantor (Printer)	EPSON	2017	2	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
		EPSON	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
34	Peralatan Perlengkapan Kantor (Wireless)	YTS	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
35	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Brankas)	Sentry Safe	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
36	Pengadaan Alat Studio (Microfon)		2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
37	Pengadaan Alat Studio (Proyektor dan layar)	Epson	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
38	Scaner	EPSON	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
39	Gorden		2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
40	Mobil Inova (pembagian dari Biro Umum)	Inova	2017	1	Pembagian dari Biro Umum	Pinjam Pakai	Baik
41	Mobil Operasional	Hilux	2017	1	Pembelian APBDP 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
42	Meja Kayu	-	2017	5	Dinas PU- PR	Pinjam Pakai	Rusak Ringan
43	Kursi Kayu	-	2017	7	Dinas PU- PR	Pinjam Pakai	Rusak Ringan
44	Meja Kerja Biro	Pro Design	2017	1	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
45	Meja Kerja 1/2 Biro	Activ	2017	3	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
46	Meja Kerja 1/2 Biro	-	2017	8	Biro Kesra	Pinjam Pakai	2 Rusak Ringan
47	Kursi Kerja	Chitose	2017	6	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
48	Kursi Kerja	Malvin	2017	3	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
49	Mobil Dapur Lapangan	Mitsubishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
50	Mobil Rescue	Mitsubishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
51	Truk	Mitsubishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
52	Mobil Tangki Air	Mitsubishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
53	Motor Lapangan	Kawasaki	2015	2	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik

Sumber: Laporan Pengurus Barang Dinsos bulan Desember Tahun 2018



b. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas UPTD Marga Rahayu :

• LAHAN

1. Luas lahan : 10.800 m²
2. Sudah Sertifikasi : 4.800 m²
3. Masih Hak Guna Pakai : 6.000 m²
4. Kondisi Lahan : Terletak di daerah dataran tinggi, bebas banjir dengan struktur tanah datar dan bukit
5. Lahan Yang Digunakan : 4.265,5 m²
6. Yang Belum Digunakan : 6.534,5 m²
7. Alamat : Jalan Kakak Tua No.41
RT. 39 RW. 14, Tanjung Selor Hilir

• BANGUNAN

Tabel 1.11 Daftar Bangunan UPTD 2018.

No.	Bentuk Bangunan	Ukuran	Jumlah
1.	Wisma Tempat Tinggal Lanjut usia terlantar	120 m ²	9 Unit
2.	Kantor		
3.	Musholla	188 m ²	1 Unit
4.	Dapur Umum	100 m ²	1 Unit
5.	Gudang	120 m ²	1 Unit
6.	Wisma Khusus/Kasih	75 m ²	1 Unit
7.	Sayang	160 m ²	1 Unit
8.	A u l a	200 m ²	1 Unit
9.	Poliklinik/Ruang	80 m ²	1 Unit
10.	Keterampilan	24 m ²	2 Unit
11.	Garasi	36 m ²	2 Unit
12.	Rumah Petugas Tipe 36	50 m ²	1 Unit
13.	Rumah Petugas Tipe 50	70 m ²	1 Unit
14.	Rumah Petugas Tipe Kopel	4 m ²	1 Unit
15.	Pos Penjagaan	-	200 Meter
	Pagar Tembok dan Pipa Besi	Lebar 1,5 M	335 Meter
	Jalan Semenisasi		
Jumlah Bangunan Keseluruhannya			: 23 Unit

Tabel 1.12 Daftar Aset Peralatan Dan Mesin UPTD 2018



No	Uraian/ Barang	Merk	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Kondisi barang
1	Kendaraan Roda 4	Kijang Inova	Aset dari Kaltim	1	Baik
2	Kendaraan Roda 4	Mitsubishi L300	Aset dari Kaltim	1	Rusak Berat
3	Kendaraan Roda 4	Ambulance Hiluc	Aset dari Kaltim	1	Rusak Ringan
2	Kendaraan Roda 2	Yamaha Jupiter	Aset dari Kaltim	2	Baik
3	CCTV	Nathan's	2018	1	Baik
4	Sound Sistem	Auder	2018	1	Baik
5	Penghancur Kertas	Secure	2018	1	Baik
6	Laptop	HP	2018	2	Baik
7	Printer	Epson	2018	2	Baik
8	Kursi Makan Lansia Kayu	-	2018	1	Baik
9	Meja Makan Lansia Kayu	-	2018	1	Baik
10	Lemari Arsip	Emporium	2018	2	Baik
11	Pemanas Air	Ariston	2018	2	Baik
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (kompor Gas)	Butterfly	2015	2	Baik
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dispenser)	Miyako	2015	2	Baik
14	Peralatan perlengkapan kantor (Mesin Absensi)	Fingerspot Preminer	2016	1	Baik
15	Peralatan Perlengkapan Kantor (Scanner)	Canoscan	2016	1	Baik
16	Pengadaan Personal Komputer (Laptop)	Asus	2016	2	Baik
		Toshiba	2016	1	Baik
17	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Mimbar/Podium)		2016	1	Baik
18	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Spring Bad)	Central Deluxe	2017	33	Baik
19	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Spray dan Bantal)	Lokal	2017	33	Baik
		Central	2017	33	Baik
20	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Ambal dan Lukisan)		2017	3	Baik
21		lokal	2017	5	Baik
22	Tanah bangunan kantor pemerintahan		1986	1	Baik
23			1996	1	Baik
24	Bangunan Gedung Permanen		1999	1	Baik



25	Bangunan Gedung Tempat Ibadah		2010	1	Baik
26	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1999	1	Baik
27	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		1999	1	Baik
28	Bangunan Gedung Tempat Pos Jaga		2013	1	Baik
29	Bangunan Gedung Tempat kerja/ Kantor		2009	1	Baik

Sumber: data pengurus barang UPTD Panti Sosial Marga Rahayu Prov. Kaltara

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah. Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas pekerjaan di bidang kesejahteraan sosial disusun SOP Dinas Sosial sebagai berikut:

1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- a) Surat Masuk
- b) Kenaikan Pangkat
- c) Kenaikan Gaji Berkala
- d) Permohonan Pengajuan Cuti
- e) Ijin Perceraian
- f) Penghargaan Satya Lencana
- g) Penerbitan SPT dan SPPD



- h) Pensiun Pegawai
- i) Usulan Ujian Dinas
- j) Pengisian SKP

2) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

- a) Pengajuan SPP dan SPM Uang Persediaan (GU)
- b) Pengajuan SPP dan SPM LS (Pihak Kegita / Bendahara)
- c) Pembuatan SPJ
- d) Pengajuan SPP dan SPM Gaji

3) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

- a) Penyusunan Laporan Realisasi Program
- b) Penyusunan LAKIP
- c) Penyusunan Profil Data PMKS
- d) Penyusunan Profil Data PSKS
- e) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

4) Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

- a) Pemulangan Orang Telantar
- b) Ijin Pendirian Yayasan Organisasi Sosial
- c) Pemberian Bantuan Tanggap Darurat

5) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- a) Permohonan Rekomendasi Ijin UGB
- b) Verifikasi Proposal KUBE
- c) Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Pendirian Yayasan
- d) Penerbitan Surat Rekomendasi LKS Proposal Bansos
- e) Penerbitan Surat Rekomendasi Operasional LKS



b. Visi dan Misi

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara menjadi Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021:

“Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara 2020 Yang Mandiri, Aman dan Damai Dengan Didukung Pemerintahan Yang bersih dan Berwibawa”.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021, dirumuskan 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

1. Mandiri

- Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

2. Aman dan Damai

- Menjaga kedaulatan negara dan NKRI.
- Membangun daerah perbatasan yang aman.
- Memberantas berbagai transaksi dan bisnis ilegal.

3. Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa

- Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
- mewujudkan pelayanan publik yang prima.
- Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan yang bebas suap dan gratifikasi.



Setelah mengidentifikasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berketetapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 yaitu Mandiri. Untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri, tiga penjabaran misi yang harus dilakukan antara lain: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Dalam mengupayakan kemandirian daerah maka Provinsi Kalimantan Utara harus memiliki masyarakat yang sejahtera. Dengan kesejahteraan yang memadai diharapkan tidak terlalu tergantung pada daerah atau wilayah lainnya sehingga bisa mandiri. Perwujudan masyarakat yang sejahtera akan diarahkan untuk mengurangi kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pengurangan kemiskinan akan lebih nyata dan terasa peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping berbagai upaya pendukung lainnya.

Pengurangan angka kemiskinan sebagai penanda berkurangnya kondisi kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah perlu diawali dengan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kelompok rentan miskin.

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Mengacu kepada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 1.13 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kemandirian PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	a. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi PMKS	Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> · Peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan ketrampilan · Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi dan sistem pengelolaan data terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatkan Kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha ekonomi produktif
				<ul style="list-style-type: none"> · Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu, rentan, penyandang disabilitas, PMKS yang tidak potensial serta kelompok marjinal lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatkan kualitas dan pemerataan jumlah sarana sosial · Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Persentase PMKS yg mendapat bantuan sosial untuk memenuhi hak dasar dan inklusivitasnya	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu, rentan, penyandang disabilitas, PMKS yang tidak potensial serta kelompok marjinal lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatkan pemberdayaan sosial dan kapasitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
					<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan para penyandang cacat dan trauma · Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan anak terlantar · Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan eks. Penyakit Sosial



				<ul style="list-style-type: none"> · Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di provinsi maupun kab/kota · Peningkatan Kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik ke daerah bencana 	<ul style="list-style-type: none"> · Memberikan diklat dan pelatihan bagi pemerintah, lembaga dan masyarakat dalam penanganan bencana alam dan bencana sosial
		Meningkatnya peran lembaga/masyarakat dalam menangani permasalahan sosial	<ul style="list-style-type: none"> · Prosentase Lembaga Sosial/PSKS yang sudah mampu memberikan pelayan sesuai SPM 	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
				<ul style="list-style-type: none"> · Penataan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui program keluarga produktif dan sejahtera yang mencakup antara lain bantuan tunai bersyarat dan/atau sementara pangan bernutrisi, peningkatan kapasitas pengasuhan dan usaha keluarga, pengembangan penyaluran 	<ul style="list-style-type: none"> · Memberikan pelatihan/diklat bagi PSKS



BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program dan Kegiatan

Program umum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dengan mengacu pada lampiran A VIII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 meliputi :

a. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 2.1

Program dan Kegiatan Dinas Sosial yang dibiayai oleh APBD Provinsi Kaltara

No	Kode	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran
I	1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.816.203.314,00
1	1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000,00
2	1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	107.000.000,00
3	1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	200.540.000,00
4	1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.192.050.000,00
5	1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000,00
6	1.06.1.06.01.01.09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	83.000.000,00
7	1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	80.523.314,00
8	1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10000.000,00
9	1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00
10	1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	375.750.000,00
11	1.06.1.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	20.000.000,00
12	1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	23.000.000,00
13	1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	105.000.000,00
14	1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan	261.800.000,00



		konsultasi ke luar daerah	
15	1.06.1.06.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	299.340.000,00
II	1.06.1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Apartur	550.000.000,00
16	1.06.1.06.01.02.11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang / Parkiran Kantor Dinas	550.000.000,00
III	1.06.1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	55.460.000,00
17	1.06.1.06.01.05.01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	55.460.000,00
IV	1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	770.559.200,00
18	1.06.1.06.01.15.06	Bantuan keluarga bersama (KUBE) bagi Keluarga Miskin	662.160.000,00
19	1.06.1.06.01.15.07	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	108.399.200,00
V	1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesaejahteraan Sosial	1.403.348.100,00
20	1.06.1.06.01.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	57.740.000,00
21	1.06.1.06.01.16.04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	233.756.000,00
22	1.06.1.06.01.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	430.572.000,00
23	1.06.1.06.01.16.09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemi	176.032.000,00
24	1.06.1.06.01.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	454.307.600,00
25	1.06.1.06.01.16.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.940.500,00
VI	1.06.1.06.01.18	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan trauma	189.280.000,00
26	1.06.1.06.01.18.06	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	189.280000,00
VII	1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	843.480.000,00



27	1.06.1.06.01.21.01	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	152.600.000,00
28	1.06.1.06.01.21.03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	143.600.000,00
29	1.06.1.06.01.21.06	Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	75.400.000,00
30	1.06.1.06.01.21.10	Pendataan dan validasi data PMKS dan PSKS	247.600.000,00
31	1.06.1.06.01.21.11	Pemberdayaan karang taruna	224.280.000,00
Total			6.628.330.614,00

Sumber: DPA Dinas Sosial Tahun 2018

b. UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu

Tabel. 2.2

Program dan Kegiatan Dinas Sosial yang dibiayai oleh APBD Provinsi Kaltara

No	Kode	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran
1	1.06.1.06.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.076.990.000,00
1	1.06.1.06.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
2	1.06.1.06.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	185.600.000,00
3	1.06.1.06.01.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00
4	1.06.1.06.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	640.550.000,00
5	1.06.1.06.01.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.600.000,00
6	1.06.1.06.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00
7	1.06.1.06.01.02. 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.800.000,00
8	1.06.1.06.01.02. 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.500.000,00
9	1.06.1.06.01.02. 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	66.500.000,00
10	1.06.1.06.01.02. 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	98.000.000,00
11	1.06.1.06.01.02. 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000,00
12	1.06.1.06.01.02. 01.16	Penyediaan makanan dan minuman	853.000.000,00
13	1.06.1.06.01.02. 01.17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	83.440.000,00



14	1.06.1.06.01.02. 01.18	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	52.000.000,00
2	1.06.1.06.02.02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.685.238,00
15	1.06.1.06.02.02.10	Pengadaan Mebeleur	35.000.000,00
16	1.06.1.06.02.02.13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00
17	1.06.1.06.02.02.16	Pengadaaan pakaian khusus hari-hari tertentu	38.050.000,00
18	1.06.1.06.02.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	28.575.238,00
19	1.06.1.06.02.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	63.060.000,00
3	1.06.1.06.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00
20	1.06.1.06.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000,00
4	1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	101.640.000,00
21	1.06.1.06.01.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	101.640.000,00
Total			2.353.315.238,00

Sumber: DPA Perubahan Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tahun 2018

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)

Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial masih dalam proses penyusunan, sehingga tingkat pelayanannya belum dapat dijabarkan. Oleh karena itu akan dijabarkan pencapaian program dan kegiatan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018.



a) Capaian Program dan Kegiatan melalui APBD Tahun Anggaran 2018

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Sosial melaksanakan 7 Program dan 29 Kegiatan pada Belanja Langsung.



Tabel 2.3 Capaian Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan UPTD PSTW

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) UBAH SESUAI RENSTRA BARU	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018			Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	satuan	K	satuan	Rp.	
1	3	4	7		12 = 8+9+10+11			16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran					4.125.590.467,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	75	Surat	64	Surat	9.627.500,00	Dinas Sosial
			5	Surat	5	Surat	2.550.000,00	UPTD Panti Lansia
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	12	Bulan	55.515.781,00	Dinas Sosial
			12	Bulan	12	Bulan	140.443.163,00	UPTD Panti Lansia
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8	Unit	7	Unit	123.900.878,00	Dinas Sosial
			5	Unit	5	Unit	3.249.600,00	UPTD Panti Lansia
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12	Bulan	12	Bulan	836.785.000,00	Dinas Sosial
			12	Bulan	12	Bulan	633.404.240,00	UPTD Panti Lansia
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	12	Bulan	26.272.200,00	Dinas Sosial
6	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15	Unit	15	unit	7.836.00,00	Dinas Sosial
			5	Unit	5	Unit	8.895.000,00	UPTD Panti Lansia
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12	Bulan	12	Bulan	61.488.700,00	Dinas Sosial
			12	Bulan	12	Bulan	29.955.850	UPTD Panti Lansia
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	12	Bulan	42.521.250,00	Dinas Sosial
			12	Bulan	12	Bulan	16.106.250,00	UPTD Panti Lansia
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	30	unit	30	unit	5.762.000,00	Dinas Sosial
			313	unit	186	unit	12.188.000,00	UPTD Panti Lansia
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	69	unit	66	unit	361.479.487,00	Dinas Sosial
			5	unit	5	unit	66.176.538,00	UPTD Panti Lansia
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60	unit	60	unit	13.538.000,00	Dinas Sosial
			33	unit	30	unit	92.703.500,00	UPTD Panti Lansia
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1464	Eks	1182	Eks	11.300.000,00	Dinas Sosial
			730	Eks	691	Eks	92.703.500,00	UPTD Panti Lansia
13	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	550	Porsi	430	Porsi	34.148.800,00	Dinas Sosial
			61	Porsi	37	Porsi	628.539.300,00	UPTD Panti Lansia
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30	Kali	28	Kali	308.605.616,00	Dinas Sosial
			10	Kali	10	Kali	78.858.761,00	UPTD Panti Lansia



15	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	70	Kali	68	Kali	376.462.953,00	Dinas Sosial
			25	Kali	25	Kali	51.625.000,00	UPTD Panti Lansia
2	Program peningkatan sarana dan prasarana Apartur	Presentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran					628.234.800,00	
16	Penyewaan rumah / gedung / gudang parkir kantor dinas	Jumlah rumah/ gedung/ gudang/ parkir kantor dinas yang di sewa	3	Unit	3	Unit	484.000.000,00	Dinas Sosial
17	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	41	Unit	41	Unit	32.850.000,00	UPTD Panti Lansia
18	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	40	Stel	40	Stel	37.880.800,00	UPTD Panti Lansia
19	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor/ yang dipelihara rutin/ berkala	23	Bangunan	18	Bangunan	21.591.000,00	UPTD Panti Lansia
20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	5	Unit	4	Unit	51.913.000,00	UPTD Panti Lansia
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase jumlah PNS yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek peraturan perundang-undangan	21		7		1.300.000,00	
21	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	5	Orang	1	Orang	1.300.000,00	UPTD Panti Lansia
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Presentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya (PMKS) yang terlayani					577.320.348,00	
22	Bantuan keluarga bersama (KUBE) bagi Keluarga Miskin	Jumlah Bantuan usaha bagi keluarga miskin (KUBE)	20	Kelompok	15	Kelompok	452.258.315,00	Dinas Sosial
23	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Warga KAT yang mendapat pembinaan dan bantuan pembangunan perumahan	1	Lokasi	1	Lokasi	125.062.033,00	Dinas Sosial
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	presentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi					653.023.650,00	
24	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah KTK dan korban Trafficking yang mendapatkan Pelayanan dan Perlindungan	10	Orang	2	Orang	13.182.000,00	Dinas Sosial
25	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Jumlah Anak Terlantar yang memiliki keterampilan	7	Orang	0	Orang	0,00	Dinas Sosial



26	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	75	PMKS	19	PMKS	95.964.000,00	Dinas Sosial
			40	PMKS		PMKS	87.538.500,00	UPT. Panti Lansia
27	Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Jumlah Peserta Rakor Program dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara	30	Orang	24	Orang	92.515.150,00	Dinas Sosial
28	Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah Tagana yang difasilitasi	100	Anggota Tagana	60	Anggota Tagana	336.100.000,00	Dinas Sosial
29	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi bidang sosial	1	Laporan	1	Laporan	27.724.000,00	Dinas Sosial
6	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat dan trauma uang mendapatkan pembinaan dan bantuan					19.928.400,00	
30	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat pendidikan dan pelatihan	10	Orang	2	Orang	19.928.400,00	Dinas Sosial
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Presentase lembaga kesejahteraan sosial dan sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan					752.833.464,00	
31	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah peserta pelatihan Penanganan PMKS	30	Orang	30	Orang	106.929.000,00	Dinas Sosial
32	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	Jumlah TKSK dan PSM melaksanakan tugas secara Profesional	30	Orang	30	Orang	109.868.100,00	Dinas Sosial
33	Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	Jumlah Petugas dan penghuni Lembaga RTPC yang dibinakan	50	Orang	27	Orang	31.862.900,00	Dinas Sosial
34	Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan Bantuan UEP	20	Orang	17	Orang	320.613.464,00	Dinas Sosial
35	Pendataan dan Validasi Data PMKS dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang valid	1	Laporan	1	Laporan	183.560.000,00	Dinas Sosial



b) Rincian Kegiatan yang Sudah di laksanakan

Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1) Bidang Sekretariat

a. Kegiatan Rutin

- 1) Mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar berdasarkan ketentuan yang ada yaitu Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jumlah surat masuk s.d Tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 1.298 dan surat keluar sebanyak 827 surat.
- 2) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2019.
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) TA 2019.
- 4) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial TA 2019.
- 5) Menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Sosial TA 2019.
- 6) Penerbitan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2017.
- 7) Penerbitan SK Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2018.
- 8) Penerbitan SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018.
- 9) Penerbitan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2018.
- 10) Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2016-2021.
- 11) Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- 12) Mengakomodir SKP ASN di lingkungan Dinas Sosial Prov. Kaltara.
- 13) Melakukan pemberkasan data-data Kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.



- 14) Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Tahun 2018 mengacu Permendagri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standart dan Prasarana Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 15) Melaksanakan pengadaan sarana kerja yang mendesak disiapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas meliputi ATK, bahan dan alat kebersihan, komponen instalasi penerangan gedung kantor dan sarana lainnya.
- 16) Melakukan administrasi dan pengelolaan barang yaitu pencatatan dan pendistribusian barang, berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 17) Mengadakan rapat rutin setiap bulannya.
- 18) Melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 479 kali baik dalam daerah maupun luar daerah.

2) Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

1) Kegiatan APBD:

a). Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan di Provinsi Kalimantan Utara Untuk membangun koordinasi yang harmonis antar instansi sekaligus mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai peran dan kedudukannya.

- **Tempat/waktu pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan



Kesenjangan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari terhitung mulai :

Hari : Selasa-Kamis

Tanggal : 04-06 September 2018

Waktu : 12.00 - Selesai

Tempat : Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor

- **Peserta Kegiatan**

Peserta Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara
- b. Kepala Bagian Kesejahteraan Biro Kesra Prov. Kaltara
- c. Kepala Bagian Produksi daerah dan SDA Biro Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara
- d. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltara
- e. Kepala Bidang Pelayanan dan SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
- f. Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
- g. Kepala Dinas, Kabid Linjamsos, Kabid dan Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 19 (Sembilan belas) orang
- h. Kepala Bulog Sub-Divre Tanjung Selor



- **Narasumber**

1. Paparan Narasumber dari Direktorat Fakir Miskin Kemensos RI
2. Paparan Narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Utara.
3. Paparan Narasumber dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara;



Gambar 2.1 Dokumentasi Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 2.2 Dokumentasi Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

b). Pemberian Insentif Tagana

Pembagian honorarium Tagana Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 124 orang dengan nominal Rp. 200.000/ bulan selama 10 bulan.

Tabel 2.4 Daftar nama penerima Insentif Tagana APBD

NO.	NAMA	KAB/KOTA	NOMOR REKENING
1	Pelda (Pur) Sapar	Bulungan	0072234693
2	Zubair, S.Pd	Bulungan	0072108523
3	Iskandar, SE	Bulungan	0072087208
4	Alimuddin, S.Sos	Bulungan	0072334892
5	Jusmiadi	Bulungan	0072229771
6	Eli Khusnaeni, SE	Bulungan	0072231392



7	Anida Andrianie, S.Pd	Bulungan	0072237587
8	Bambang Rudiono, S.Pd	Bulungan	0072210352
9	Budi Syamsudin	Bulungan	0072229657
10	M. Donny Halim	Bulungan	1692010112
11	Aguenes	Bulungan	1372050345
12	Irma Lutfy Farlyna, SP	Bulungan	1372050370
13	Jusman	Bulungan	1372050388
14	Ismail Bin Idrus	Bulungan	1692010007
15	Rina Lesmana	Bulungan	1372050361
16	Reni Ingan	Bulungan	0072229673
17	Andi Nursamsul	Bulungan	0072184751
18	Hendryk L. Sigara, S.Sos	Bulungan	0072158971
19	Sunardi	Bulungan	1372050396
20	Ferry Pardiansyah, SE	Bulungan	1372050353
21	Ayu Utami Hasyfaraini	Bulungan	1372008071
22	Jul Akbar, S.Sos	Bulungan	1692010155
23	Rita Nurlala	Bulungan	0072334906
24	M. Robiansyah / Robitus	Bulungan	1372017887
25	Meylisa Harjanti	Bulungan	1692010368
26	Yahya Iskandar	Bulungan	0072229649
27	Edy Susanto	Bulungan	0072231309



28	Haryati	Bulungan	1692011445
29	Kasemin	Bulungan	0052392071
30	Eva Ratnasari	Bulungan	0052393990
31	Syahrullah	Bulungan	0072234847
32	Sugiyarto	Bulungan	0072299396
33	Abdul Latif	Bulungan	1702007379
34	Tri Baru Asih, S. Tr. Keb	Bulungan	0072208021
35	Dt. Mohd. Isa Ansari, SH	Bulungan	0072229754
36	Muhammad Zainuri	Bulungan	0072206592
37	Sugianto Sarijo	Bulungan	0072334485
38	Rudiansyah	Bulungan	1692010147
39	Muhammad Zendi Gazali	Bulungan	1372023038
40	Denny Rayfhian, SE	Bulungan	0058013706
41	Mashud, S. Sos	Bulungan	1692010104
42	Andri Purnomo	Bulungan	1372050230
43	Nurjanah, S. Kom	Bulungan	0078011301
44	Ajianto	Nunukan	1587002937
45	Andi Arman	Nunukan	0092700763
46	Samsul	Nunukan	1582008821
47	Slamet Budi Santoso, SH	Nunukan	1587002945
48	Nurdianti, SE	Nunukan	1587002902



49	Nur Eka	Nunukan	0092088260
50	Eva Wahyuni, SE	Nunukan	0092115836
51	Hasmiyati, S.Pd.I	Nunukan	0092003795
52	Fadli	KTT	0057094729
53	Muhammad Yusuf	KTT	0142068451
54	Ronie Selamat	KTT	1632003575
55	Wahaf	KTT	1632003583
56	Midun	Malinau	0122403335
57	Juarmanto	Malinau	0127410852
58	Dina Maryana, SE	Tarakan	1202023297
59	Ardiansyah	Tarakan	1202026041
60	Aidil Febriyan	Tarakan	1202057370
61	Agus Raharjo, S.Ip	Tarakan	0052292948
62	Kuswadi Jakaria	Tarakan	1207008407
63	Adnan Buyung	Tarakan	0052260213
64	Hermansyah, SE	Tarakan	1162052442
65	Aulianegara, S.H	Tarakan	1162041076
66	M.Fahrul Faiturrahman	Tarakan	1162048216
67	Irfan. M, SE	Tarakan	1162036552
68	Indra Ferdiansyah	Tarakan	0052430461
69	Muzakkir, SE	Tarakan	1167013950



70	Baharuddin	Tarakan	0052430208
71	Muhammad Haidir	Tarakan	0052344140
72	Fauzan Wahyudi, SE	Tarakan	0052269644
73	Yudi Heksawan	Tarakan	0052430372
74	Darmawan	Tarakan	1162036498
75	Syahrianto	Tarakan	1222068301
76	Muhammad Yusuf	Tarakan	1167015472
77	Firda Putri Ani, SE	Tarakan	0057045507
78	Feby Mulyani, SE	Tarakan	0052420881
79	Billy Ocean Tabang	Tarakan	1222033833
80	Adi Wibowo	Tarakan	1202065330
81	Herlinda	Tarakan	0052506671
82	Ardiansyah	Tarakan	1162059501
83	Nuraliansyah	Bulungan	0077036121
84	Abdul Munir	Bulungan	1162036439
85	Jamal	Bulungan	1692010139
86	Hariyadi	Bulungan	1692006379
87	Lucky Hardiantoro	Tarakan	1202039363
88	Yuliana Fesriana Batmomolin	Tarakan	0052430445
89	Sjafruddin	Tarakan	0052459648
90	Ananda Wira Pratama	Tarakan	0052431123



91	Teguh Adiyatma	Tarakan	0052460409
92	Robby Okto Pian	Bulungan	0072334388
93	Dorkas Namsung	Bulungan	0072229746
94	Ahmad Syahroni	Bulungan	0072185994
95	Burhanuddin	Bulungan	0072229827
96	Agustinus Aka	Bulungan	0072229801
97	M. Haryanto	Bulungan	0072270444
98	Muzakkar	Bulungan	0077050779
99	Hendra Wahyudi	Bulungan	1372016163
100	Jainiansyah	Bulungan	1628001550
101	M. Ali Usman	Bulungan	0072179013
102	Asep Suriyatman	Bulungan	0072259025
103	Jumaansyah	Bulungan	0072090357
104	Suardi	Bulungan	1692003311
105	Endar Kurniawan	Bulungan	1622002490
106	Naharuddin	Bulungan	0072203551
107	Sudirman, S.Ag	Bulungan	0072112385
108	Asri	Bulungan	0072222083
109	Raudhatul Munawwarah	Bulungan	0072221672
110	Mardiana	Bulungan	0077019961
111	Rafidin, S.Sos	Bulungan	0072071806



112	Arbain	Bulungan	0072003616
113	Sondi Julianto, ST	Bulungan	1162027979
114	Dedy Hardiyanto, S.Pd	Bulungan	0072259050
115	Hanafiah Indra. IG	Bulungan	0052371619
116	Syaharuddin	Bulungan	0072304845
117	Daniel possing	Bulungan	0072334663
118	Agustinus	Bulungan	0072241835

c.) Pemulangan Orang Terlantar

Pemulangan orang terlantar pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.5 Daftar Nama OT yang dipulangkan

No	N a m a	TTL/Umur	Alamat / Daerah Asal	Tanggal Pemulangan
1	Amiruddin	Sinjai, 08 November 1978/39 Tahun	Jl. Baruttung ,Tokka RT. 04 Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Sul- Sel	27 Feb 2018
2	Rispa	Donggala, 22 Agustus 1999/ Tahun	RT.II Desa Lenju Kec. Sojol Utara Kab. Donggala Sul- Teng	27 Apr 2018
3	Raimundus	46 Tahun	Malaka Tengah Kec. Betun Kab. Atambua	12 Mei 2018
4	Rusdi	Sinjai, 08 November 1978/39 Tahun	Jl. Baruttung ,Tokka RT. 04 Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Sul- Sel	27 Feb 2018
5	Rini Fitriani	Kudus, 31 Desember 1983/ 35 Tahun	Panti Muria Jaya Conge RT. 005 RW.002 Kel. Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus Ja – Teng	21 Sept 2018



6	M.Khoirul Anam	Palembang, 07 Juni 2004/ 14 Tahun	Panti Muria Jaya Conge RT. 005 RW.002 Kel. Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus Ja – Teng	21 Sept 2018
7	M.Fitria Fermansyah	Palembang, 12 Juli 2006/ 12 Tahun	Panti Muria Jaya Conge RT. 005 RW.002 Kel. Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus Ja – Teng	21 Sept 2018
8	Davia Anggreini	Palembang, 31 Desember 2010/ 8 Tahun	Panti Muria Jaya Conge RT. 005 RW.002 Kel. Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus Ja – Teng	21 Sept 2018
9	Mesyai Amelia Putri	Palembang, 12 Juli 2013/ 5 Tahun	Panti Muria Jaya Conge RT. 005 RW.002 Kel. Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus Ja – Teng	21 Sept 2018
10	Desta Maulana	Palembang, 27 Desember 2015/ 3 Tahun	Panti Muria Jaya Conge RT. 005 RW.002 Kel. Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus Ja – Teng	21 Sept 2018
11	Pepeng		Kilo 4 Batu Ampar Balikpapan Kal- Tim	12 Nov 2018



Gambar 2.3 Orang Terlantar yang akan dipulangkan an. Amiruddin)
(Sumber: Dokumentasi Panitia



Gambar 2.4 Orang Terlantar yang akan dipulangkan an. Pepeng)
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

d.) Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)

Tabel 2.6 Daftar Nama ABH

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Moh. Yusril	Jl. Pamanasan RT 03 Kec. Mansapa Kel. Nunukan Selatan	Penjemputan dari Panti Sosial Marsudi Putra Handayani, Bambu Apus Jakarta



Gambar 2.5 Penjemputan ABH
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 2.6 Pertemuan ABH dengan orang tua
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



e. Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Tabel 2.7 Daftar Nama Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial

No	N a m a	TTL/Umur	Alamat / Daerah Asal	Tanggal Pemulangan
1	Wagino	Sei Baruhur, 27 Agustus 1987/ 31 Tahun	Jl. Ranim RT.002 Kel/ Desa Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir	25 Juli 2018
2	Wariska Diana Zuliati	Tuban, 09 Juli 1992/ 26 Tahun	Jl. Ranim RT.002 Kel/ Desa Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir	25 Juli 2018
3	Dian	Yogyakarta, 22 Oktober 2016/ 2 Tahun	Jl. Ranim RT.002 Kel/ Desa Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir	25 Juli 2018
4	Mhd.Alim Efendi	Kisaran, 09 April 1983/ 35 Tahun	Jl. Ranim RT.002 Kel/ Desa Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir	25 Juli 2018
5	M. Affendi Bin Abdullah	Sulsel, 22 Feb 1972/ 46	Daerah Pasir Putih, Kec. Nunukan Prov. Kaltara	25 Juli 2018



Gambar 2.7 Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial

(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 2.8 Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

1. Bimtek TKSK

Untuk mendorong upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial sampai tingkat Kecamatan kearah yang lebih baik, maka Departemen Sosial memprakarsai terbentuknya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK sebagai perwujudan partisipasi sosial masyarakat. TKSK merupakan pelaksana pendampingan sosial yang bisa menjembatani program Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengerakkan masyarakat dan potensi kesejahteraan lainnya. Keberadaan TKSK juga dapat mendukung pelaksanaan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance based bugeting*) yang membutuhkan pemetaan target sasaran sehingga diperlukan orang yang berada dilokasi sasaran Pemerintah Daerah dalam kaitan ini Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota diharapkan



dapat membina dan mendayagunakan TKSK dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Untuk itu perlu dilakukan bimbingan teknis Untuk meningkatkan kualitas kinerja TKSK dalam melaksanakan tugas pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan social, Agar TKSK dapat memahami ragam kegiatan pendampingan sosial yang perlu dilaksanakan Dan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi didalam PMKS dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut.

- **Tempat/waktu pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis TKSK dalam Penanganan PMKS Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari terhitung mulai :

Hari : Senin-Rabu
Tanggal : 12-14 Maret 2018
Waktu : 12.00 - Selesai
Tempat : Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor

- **Peserta Kegiatan**

Peserta Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Bulungan sebanyak 10 orang
2. Kabupaten Malinau 7 orang
3. Kabupaten Nunukan sebanyak 8 orang
4. Kota Tarakan sebanyak 2 orang
5. Kabupaten Tana Tidung sebanyak 3 orang



- **Narasumber**

1. Drs. Timbul Sibarani, M.AP dari BAPPEDA Prov. Kaltara
2. Drs. H. Sugiono, M.Si dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
3. Hj. Sumiati, SE dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
4. Dra. Hj. Arsanah dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 2.9 Bimtek TKSK APBD
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

2. Pemberian Tali Asih TKSK

Daftar Penerima Insentif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 55 Orang @ Rp 400.000/Bulan.

Tabel 2.8 Daftar SK Nama Penerima Tali Asih TKSK APBD

NO	Nama	No Rekening	Bank
01	Berahim	0092715493	Bank Kaltimtara
02	Armansyah,S.Sos	1742000547	Bank Kaltimtara



03	Suharjo	0092116719	Bank Kaltimtara
04	Syahrudin, SH	1072050327	Bank Kaltimtara
05	Rasdiana	1077037604	Bank Kaltimtara
06	Muddar	0097205931	Bank Kaltimtara
07	Paskalis	0092159710	Bank Kaltimtara
08	Muh. Ramadan, A.Md	1602017326	Bank Kaltimtara
09	Ari Rahman Ananda, SE	122406083	Bank Kaltimtara
10	Fini Lily	122300277	Bank Kaltimtara
11	Dewi Nova Vristina	122501701	Bank Kaltimtara
12	Patria, A. Md	122915450	Bank Kaltimtara
13	Jekson, S. Sos	0122914577	Bank Kaltimtara
14	Kahang, S.Sos	0122227448	Bank Kaltimtara
15	Hermansyah	1162052442	Bank Kaltimtara
16	Dina Suryana Pratama Sari	0052429862	Bank Kaltimtara
17	Ardiansyah	1202026041	Bank Kaltimtara
18	M. Fahrul Faiturrahman	1162048216	Bank Kaltimtara
19	Mohamad Hamzah, S.Sos	0072255771	Bank Kaltimtara
20	Hendra Wahyudi	1372016163	Bank Kaltimtara
21	Jul Akbar, S.Sos	1692010155	Bank Kaltimtara
22	Endar Kurniawan	1622002490	Bank Kaltimtara
23	Jainiansyah	1628001550	Bank Kaltimtara
24	Hariyadi	1692006379	Bank Kaltimtara
25	Suardi	1692003311	Bank Kaltimtara
26	Naharuddin	72203551	Bank Kaltimtara
27	Jaimah, Z	0072223730	Bank Kaltimtara
28	Jainah Aprilliani, S.Pi	1637000302	Bank Kaltimtara
29	Rina Susilawati	0147034661	Bank Kaltimtara
30	Ridwan	0142053519	Bank Kaltimtara
31	Sungkowo	0142067058	Bank Kaltimtara
32	Chaerul Bahri	164401000936535	BRI
33	Saharuddin	459701012055537	BRI



34	Indra Bangsawan	789801003638533	BRI
35	Susana Tiku Mairi., A.Md	361501002166509	BRI
36	Margareta, A. Md	224601000878502	BRI
37	Roni Aldiki, SH	224601001829530	BRI
38	Abiah Daniel, SE	351501015777535	BRI
39	Samuel Surang, S.Sos	361501022848539	BRI
40	Rostiana, S.Sos	343601012902531	BRI
41	Arianthi Ajang, SE	361501023053535	BRI
42	Tugianto	343801024101537	BRI
43	Lenni Tambun ST	343801021346536	BRI
44	Sunardi	458801001875539	BRI
45	Muhamad Doni Halim	343801001282508	BRI
46	Irma Lutfy Farlyna,SP	343801026230536	BRI
47	Aguenes	458801011909530	BRI
48	Wahyuni Setiya Wardhana	030601015601502	BRI
49	Agutinus Aka	458901008792532	BRI
50	Reni Ingan	343801029047534	BRI
51	Anike Vesti	733701004050532	BRI
52	Yudi Ardiansyah, S.Pd	733701001260502	BRI
53	Ummi Wahdaniaah	018301008851536	BRI
54	Ruslan, SH	343801017180532	BRI
55	Rina Lesmana SP, MM	0252034544	BNI

3. Bimtek PSM

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara PSM mempunyai posisi yang strategis bagi masa depan bangsa. Kemajuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditentukan oleh kualitas PSM sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan



Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan aktualisasi ditengah tengah kehidupan masyarakat. Pengaruh budaya global akan mudah mengubah pola pikir, sikap dan perilaku para Pekerja sosial Masyarakat. Dengan kecanggihan teknologi informasi yang begitu mudah di akses jelas akan mempercepat proses akulturasi dikalangan Pekerja Sosial Masyarakat.

Keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat dalam penanganan PMKS sangat diharapkan selain sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat juga dapat menginisiasi penanganan masalah sosial dan mendorong, mengerakkan serta mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan harapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menjadi bagian keberhasilan bangsa ini dalam meneruskan estafet pembangunan kesejahteraan sosial.

- **Tempat/Waktu Pelaksanaan Kegiatan.**

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis PSM Dalam Penanganan PMKS Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari terhitung mulai :

Hari	:	Selasa s/d Kamis
Tanggal	:	10 s/d 12 April 2018
Waktu	:	12.00 Wite - Selesai
Tempat	:	Hotel Pangeran Khar Tanjung Selor



Peserta Kegiatan

Peserta Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian :

1. Kabupaten Bulungan sebanyak 10 orang;
2. Kabupaten Malinau 2 orang;
3. Kabupaten Nunukan sebanyak 4 orang ;
4. Kota Tarakan sebanyak 10 orang;
5. Kabupaten Tana Tidung sebanyak 4 orang.

- **Narasumber**

Narasumber berasal dari BAPPEDA dan Litbang Prov.Kaltara Sebanyak 1 (satu) Orang, dan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 3 (tiga) orang.





Gambar 2.10 Pembukaan Bimtek PSM APBD oleh Asisten 1
Bapak Sanusi dan Kadis Dinsos Prov.Kaltara
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 2.11 Bimtek PSM APBD
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



4. Bimtek Karang Taruna

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana pembangunan secara umum tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Pembangunan harus dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Berangkat dari titik ini, upaya yang terus dihembuskan yaitu mengurangi secara signifikan peran-peran dominan pemerintah dan sekaligus membuka ruang-ruang baru bagi masyarakat untuk menjadi pelaku dalam pembangunan. Pemerintah diharapkan memposisikan diri bukan sebagai prorider pembangunan tetapi lebih pada perannya sebagai fasilitator, regulator, dan pengendali.

Dalam arus modernisasi saat ini, Karang Taruna harus merubah tatanan baru dalam dimensi kelembagaan. Perubahan-perubahan signifikan dalam mengikuti arus globalisasi dan desentralisasi ternyata memunculkan tantangan terbuka yang sangat dinamis mulai dari tingkat gagasan hingga aksi langsung ditengah masyarakat. Pergolakan juga seringkali muncul dalam penyelenggaraan organisasi sebagaimana lazimnya sebuah organisasi yang dikelola oleh kaum muda, disamping tentunya budaya dan etos kerja organisasi yang memang terus menuntut peningkatan seiring dengan perubahan masyarakat yang terjadi.

Untuk mendorong upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial kearah yang lebih baik, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara



memberikan materi yang terangkai dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Karang Taruna yang menyasar pada karang taruna yang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

- **Tempat/Waktu Pelaksanaan Kegiatan.**

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Karang Taruna dilaksanakan di Hotel Grand Pangeran Khar, sedangkan pembukaannya dilaksanakan di Gunung Sari KM.12 Pondok Pesantren Fatimah Azzahra pada Tanggal 11 Oktober 2018 yang juga memperingati hari Bulan Bakti Karang Taruna dan Hari kesetiakawanan Sosial Nasional.

Jadwal Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas karang Taruna Tahun 2018 :

Hari : Selasa – Jumat
Tanggal : 09 – 12 Oktober 2018
Registrasi Peserta : Selasa, 09 Oktober 2018,
Pukul 13.00 Siang.

- **Peserta Kegiatan**

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Karang Taruna Kota Tarakan	: 13 orang
2. Karang Taruna Kab. Bulungan	: 25 orang
3. Karang Taruna Kab. Nunukan	: 13 orang
4. Karang Taruna Kab. Malinau	: 12 orang
5. Karang Taruna Kab. Tana Tidung	: 12 orang
Total keseluruhan peserta	: 75 orang



- **Narasumber**

Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas karang Taruna Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 berasal dari Kementerian Sosial RI sebanyak 1 (satu) orang, Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 1 (satu) orang, dan dari Dinas Sosial provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

3. Devi Deliani, S.ST, M.Kesos selaku Kepala Seksi Karang Taruna Kemensos RI;
4. Arkanata Akram, S.T, B.E.(Hons), MEngSc selaku Tim Percepatan Pembanguna Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Drs. H. Sugiono, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltara;
6. Dra. Hj. Arsanah selaku Kepala Bidang Dayasos dan PFM Dinsos Prov. Kaltara.



Gambar 2.12 Pembukaan Bimtek Karang Taruna
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 2.13 Materi Oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah
Prov. Kaltara oleh Arkanata Akram, S.T, B.E.(Hons), MEngSc
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

5. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

Adapun tujuan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT bertujuan untuk mewujudkan Perlindungan hak sebagai warga negara, Pemenuhan kebutuhan dasar, Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas, dan Kemandirian sebagai warga negara. Sedangkan kriteria KAT dimaksud meliputi : Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar,



Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam, Marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan dalam bidang; permukiman; administrasi kependudukan; kehidupan beragama; kesehatan; pendidikan; ketahanan pangan; penyediaan akses kesempatan kerja; penyediaan akses lahan; advokasi dan bantuan hukum; pelayanan sosial; dan lingkungan hidup.

1. Pemetaan Sosial

Kegiatan persiapan pemberdayaan dimulai dengan kegiatan Pemetaan Sosial. Pemetaan Sosial merupakan kegiatan verifikasi data demografi, geografis, dan spasial serta informasi lainnya terhadap lokasi yang diprediksi dihuni KAT. Lokasi yang menjadi lokasi kegiatan ini adalah lokasi KAT yang terdapat pada database Pemberdayaan KAT. Lokasi tersebut diprediksi atau diasumsikan dihuni warga KAT berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas dan/atau masyarakat, serta diusulkan dinas/instansi sosial daerah baik kabupaten maupun provinsi sebagai calon lokasi Pemberdayaan KAT.

2. Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan

Penjajagan Awal (PA) merupakan kegiatan penilaian terutama berdasarkan pertimbangan aspek etnografi dan sosiologi dalam instrumen untuk menentukan KAT atau bukan KAT serta menetapkan kategori KAT. Sedangkan Studi Kelayakan (SK) merupakan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan, serta alternatif pemecahan masalah KAT mengingat luasnya pranata sosial budaya

warga KAT, maka studi yang dilaksanakan terfokus pada beberapa aspek yang dapat dirubah tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budayanya.



Gambar 2.14 Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 2.15 Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

3. Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Daerah

Seminar dan Lokakarya (Semiloka) dilaksanakan untuk membahas hasil penjajagan awal dan studi kelayakan (PA/SK) guna mendapat saran dan pertimbangan terhadap rencana awal pemberdayaan KAT. Melalui kegiatan ini akan disampaikan tentang sinergi dan kontribusi berbagai



pihak yang akan dilibatkan sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Semiloka Daerah bertujuan untuk menginformasikan secara utuh kondisi etnografis lokasi hasil Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan dengan merumuskan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di lokasi sesuai kondisi setempat.



Gambar 2.16 Kegiatan Semiloka di kab. Nunukan
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 2.17 Kegiatan Semiloka di kab. Nunukan
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

b. Pembinaan Lembaga RPTC

Kegiatan pembinaan lembaga RPTC dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan koordinasi ke Lembaga Rumah Penyandang Trauma Center (RPTC) di Kab. Nunukan.



Gambar 2.18 Kegiatan Pembinaan lembaga RPTC
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 2.19 Kegiatan Pembinaan lembaga RPTC
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



c. Bantuan KUBE Bagi Fakir Miskin

1. Bantuan KUBE di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI sejak tahun 1983 telah meluncurkan program penanganan kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) selama lebih kurang 28 tahun, KUBE masih merupakan ikon Kementerian Sosial. berdasarkan hasil penelitian Haryati Roebyantho dalam bukunya yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan melalui KUBE” yang diterbitkan oleh P3KS Press tahun 2012 dari hasil evaluasinya direkomendasikan bahwa KUBE masih merupakan program alternatif penanganan kemiskinan.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 melaksanakan Kegiatan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Keluarga Miskin di 2 (Dua) Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.



Gambar 2.20 Bantuan KUBE di Kab. Nunukan
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 2.21 Bantuan KUBE di Kab. Nunukan
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 2.22 Bantuan KUBE di Kab. Tana Tidung
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 2.23 Bantuan KUBE di Kab. Tana Tidung
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

4) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu yang terletak di Jalan Kakatua Tanjung Selor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Bimbingan Sosial



Gambar 2.24 Kegiatan Bimbingan Sosial di UPTD Panti Sosial
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

2. Kegiatan Bimbingan Keterampilan



Gambar 2.25 Kegiatan Bimbingan Keterampilan
di UPTD Panti Sosial
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



3. Kegiatan Bimbingan Olahraga / Senam



Gambar 2.18 Kegiatan Bimbingan Olahraga/ Senam
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

4. Kegiatan Posyandu Lansia



Gambar 2.26Kegiatan Posyandu Lansia
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



5. Kegiatan Lomba-Lomba



Gambar 2.27 Kegiatan Lomba-Lomba
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

6. Kegiatan Pelayanan



Gambar 2.28 Kegiatan Posyandu Lansia
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan sosial di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018, Dinas Sosial mendapatkan Anggaran yang bersumber dari APBD Belanja langsung sebesar Rp 6.265.017.614,00 dan Anggaran Belanja Tidak langsung sebesar Rp 3.533.714.244,00. sedangkan UPT Panti Sosial Tresna Werdha mendapat anggaran belanja langsung sebesar menjadi Rp 2.353.315.238,00,- sedangkan Anggaran Belanja Tidak langsung sebesar Rp 1.126.259.000,00,- Adapun realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2018 yang tertera pada Tabel di bawah ini.



Tabel 2.11 Realisasi Anggaran APBD dan APBD Perubahan Dinas Sosial Prov. Kaltara Per 31 Desember 2018

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)	PPTK & BENDAHARA
			FISIK		KEUANGAN				
			%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)		
DINAS SOSIAL	9.798.731.858	100,00	88,44	88,44	7.689.185.524	78,47	78,47	2.109.546.334	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.533.714.244	36,06	100,00	36,06	3.014.373.997	85,30	30,76	519.340.247	
BELANJA LANGSUNG	6.265.017.614	63,94	81,92	52,38	4.674.811.527	74,62	47,71	1.590.206.087	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.602.192.314	26,56	96,06	25,51	2.275.244.165	87,44	23,22	326.948.149	Hj. Ambaliah Balisah, SE
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	0,12	100,00	0,12	9.627.500	80,23	0,10	2.372.500	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	66.000.000	0,67	100,00	0,67	55.515.781	84,11	0,57	10.484.219	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	174.540.000	1,78	100,00	1,78	123.900.878	70,99	1,26	50.639.122	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	985.000.000	10,05	90,84	9,13	836.785.000	84,95	8,54	148.215.000	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.350.000	0,27	100,00	0,27	26.272.200	99,70	0,27	77.800	
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8.000.000	0,08	100,00	0,08	7.836.000	97,95	0,08	164.000	
Penyediaan alat tulis kantor	63.000.000	0,64	100,00	0,64	61.488.700	97,60	0,63	1.511.300	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70.523.314	0,72	100,00	0,72	42.521.250	60,29	0,43	28.002.064	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000	0,08	100,00	0,08	5.762.000	72,03	0,06	2.238.000	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	370.797.000	3,78	98,38	3,72	361.479.487	97,49	3,69	9.317.513	
Penyediaan peralatan rumah tangga	14.500.000	0,15	100,00	0,15	13.538.000	93,37	0,14	962.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.000.000	0,14	100,00	0,14	11.300.000	80,71	0,12	2.700.000	
Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000	0,61	89,58	0,55	34.148.800	56,91	0,35	25.851.200	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	340.340.000	3,47	100,00	3,47	308.605.616	90,68	3,15	31.734.384	
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	389.142.000	3,97	100,00	3,97	376.462.953	96,74	3,84	12.679.047	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	484.000.000	4,94	100,00	4,94	484.000.000	100,00	4,94	0	Hj. Ambaliah Balisah, SE
penyewaan rumah / gedung / gudang parkir kantor dinas	484.000.000	4,94	100,00	4,94	484.000.000	100,00	4,94	0	
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan per	807.289.200	8,24	81,05	6,68	577.320.348	71,51	5,89	229.968.852	Dra. Hj. Arsanah
Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin	678.890.000	6,93	77,46	5,37	452.258.315	66,62	4,62	226.631.685	
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	128.399.200	1,31	100,00	1,31	125.062.033	97,40	1,28	3.337.167	



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018*

1.06. ...1.06.01.01. 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.351.788.100	13,80	45,66	6,30	565.485.150	41,83	5,77	786.302.950	Suriansyah, ST
1.06. ...1.06.01.01. 16. 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdag	57.740.000	0,59	28,22	0,17	13.182.000	22,83	0,13	44.558.000	
1.06. ...1.06.01.01. 16. 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar terma	186.256.000	1,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00	186.256.000	
1.06. ...1.06.01.01. 16. 07	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejaht	380.572.000	3,88	27,54	1,07	95.964.000	25,22	0,98	284.608.000	
1.06. ...1.06.01.01. 16. 09	Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penangg	117.740.000	1,20	84,25	1,01	92.515.150	78,58	0,94	25.224.850	
1.06. ...1.06.01.01. 16. 10	Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat d	558.539.600	5,70	63,09	3,60	336.100.000	60,17	3,43	222.439.600	
1.06. ...1.06.01.01. 16. 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.940.500	0,52	87,49	0,45	27.724.000	54,42	0,28	23.216.500	
1.06. ...1.06.01.01. 18	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan trauma	139.280.000	1,42	18,15	0,26	19.928.400	14,31	0,20	119.351.600	Suriansyah, ST
1.06. ...1.06.01.01. 18. 03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	139.280.000	1,42	18,15	0,26	19.928.400	14,31	0,20	119.351.600	
1.06. ...1.06.01.01. 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	880.468.000	8,99	96,76	8,69	752.833.464	85,50	7,68	127.634.536	Dra. Hj. Arsanah
1.06. ...1.06.01.01. 21. 01	Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha	106.929.000	1,09	100,00	1,09	106.929.000	100,00	1,09	0	
1.06. ...1.06.01.01. 21. 03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	109.868.100	1,12	100,00	1,12	109.868.100	100,00	1,12	0	
1.06. ...1.06.01.01. 21. 06	Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	70.400.000	0,72	95,74	0,69	31.862.900	45,26	0,33	38.537.100	
1.06. ...1.06.01.01. 21. 11	Pemberdayaan Karang Taruna	372.670.900	3,80	100,00	3,80	320.613.464	86,03	3,27	52.057.436	
1.06. ...1.06.01.01. 21. 15	Pendataan dan Validasi Data PMKS dan PSKS*	220.600.000	2,25	88,42	1,99	183.560.000	83,21	1,87	37.040.000	
JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER		9.798.731.858	100,00	88,44	88,44	7.689.185.524	78,47	78,47	2.109.546.334	

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Sosial Prov. Kaltara Per 31 Desember 2018.



Tabel 2.12 Realisasi Anggaran APBD dan APBD Perubahan UPTD PSTWMR Prov. Kaltara Per 31 Desember 2018

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)	PPTK	
			FISIK		KEUANGAN					
			%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)			
UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU	3.479.574.238	100,00	99,21	99,21	2.878.686.902	82,73	82,73	600.887.336	Suryani S	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.126.259.000	32,37	100,00	32,37	876.058.400	77,78	25,18	250.200.600		
BELANJA LANGSUNG	2.353.315.238	67,63	98,83	66,84	2.002.628.502	85,10	57,55	350.686.736		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.076.990.000	59,69	99,19	59,21	1.769.555.202	85,20	50,86	307.434.798		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0,09	87,00	0,08	2.550.000	85,00	0,07	450.000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	185.600.000	5,33	100,00	5,33	140.443.163	75,67	4,04	45.156.837		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000	0,10	100,00	0,10	3.249.600	92,85	0,09	250.400		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	640.550.000	18,41	99,87	18,38	633.404.240	98,88	18,20	7.145.760		
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.600.000	0,33	100,00	0,33	8.895.000	76,68	0,26	2.705.000		
Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000	0,86	100,00	0,86	29.955.850	99,85	0,86	44.150		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.800.000	0,86	64,26	0,55	16.106.250	54,05	0,46	13.693.750		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.500.000	0,36	100,00	0,36	12.188.000	97,50	0,35	312.000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	66.500.000	1,91	100,00	1,91	66.176.538	99,51	1,90	323.462		
Penyediaan peralatan rumah tangga	98.000.000	2,82	94,90	2,67	92.703.500	94,60	2,66	5.296.500		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000	0,22	100,00	0,22	4.860.000	64,80	0,14	2.640.000		
Penyediaan makanan dan minuman	853.000.000	24,51	100,00	24,51	628.539.300	73,69	18,06	224.460.700		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	83.440.000	2,40	100,00	2,40	78.858.761	94,51	2,27	4.581.239		
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	52.000.000	1,49	100,00	1,49	51.625.000	99,28	1,48	375.000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.685.238	4,73	100,00	4,73	144.234.800	87,58	4,15	20.450.438		
Pengadaan mebeleur	35.000.000	1,01	100,00	1,01	32.850.000	93,86	0,94	2.150.000		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	38.050.000	1,09	100,00	1,09	37.880.800	99,56	1,09	169.200		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	28.575.238	0,82	100,00	0,82	21.591.000	75,56	0,62	6.984.238		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63.060.000	1,81	100,00	1,81	51.913.000	82,32	1,49	11.147.000		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	0,29	13,00	0,04	1.300.000	13,00	0,04	8.700.000		
Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000	0,29	13,00	0,04	1.300.000	13,00	0,04	8.700.000		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	101.640.000	2,92	98,03	2,86	87.538.500	86,13	2,52	14.101.500		
Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejah	101.640.000	2,92	98,03	2,86	87.538.500	86,13	2,52	14.101.500		
JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER	3.479.574.238	100,00	99,21	99,21	2.878.686.902	82,73	82,73	600.887.336		

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik UPTD PSTWMR Prov. Kaltara Per 31 Desember 2018



4. Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan yang dilakukan dalam menyusun program Pembangunan Kesejahteraan Sosial mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dimana dimulai dari Penyusunan RENSTRA SKPD, RENJA SKPD dan RKA SKPD.

a) Penyusunan RENSTRA SKPD

Proses Penyusunan RENSTRA mengacu kepada Prioritas agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, dimaksudkan untuk dapat memayungi dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setelah mengidentifikasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berketetapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 yaitu Mandiri. Untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri, tiga penjabaran misi yang harus dilakukan antara lain: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Dalam mengupayakan kemandirian daerah maka Provinsi Kalimantan Utara harus memiliki masyarakat yang sejahtera. Dengan kesejahteraan yang memadai diharapkan tidak terlalu tergantung pada daerah atau wilayah lainnya sehingga bisa mandiri. Perwujudan masyarakat yang sejahtera akan diarahkan untuk mengurangi kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pengurangan kemiskinan akan lebih nyata dan terasa peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping berbagai upaya pendukung lainnya.



b) Renja SKPD

Renja SKPD berisikan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD pada jangka waktu 1 tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD. Untuk menjaga konsistensi RKPD disusun dengan menggunakan Renja SKPD dan dikoordinasikan melalui forum SKPD. Renja SKPD mencakup rencana kerja yang disusun oleh SKPD dalam bentuk program dan kegiatan berikut kebutuhan dana dilaksanakan langsung oleh SKPD. Karena Renja SKPD adalah jabaran dari Renstra SKPD, maka program dan kegiatan yang ditetapkan harus lebih rinci, lengkap dengan indikator dan target kinerja.

c) RKA SKPD

RKA-SKPD adalah dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana dan anggaran SKPD yang antara lain memuat rencana program dan kegiatan serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD. Sebelum ditetapkannya RKA SKPD, SKPD terlebih dahulu menyusun KUA/ PPAS. RKA mencakup :

- 1) Informasi Program dan Kegiatan; dan
- 2) Informasi Anggaran.

Setelah RKA SKPD disusun, maka ditetapkan menjadi rincian APBD SKPD. Berdasarkan proses Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran tersebut setelah melalui Pembahasan dengan Tim Anggaran Provinsi dan DPRD maka ditetapkan APBD masing-masing SKPD yang dituangkan dalam bentuk DPA SKPD.

5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, pada tahun 2017 Dinas Sosial berpisah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.



Berdasarkan perubahan tersebut semua aset Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara tercatat menjadi aset milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan baik APBD maupun APBN di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara kurang memadai, adapun uraiannya sebagai berikut :

- a. Kondisi kantor masih sewa
- b. Bangunan Panti Jompo yang sudah menetap di Jl. Kakatua Tanjung Selor, namun kondisi bangunan UPTD masih harus ada perbaikan terutama jalan di lingkungan UPTD, mushola serta belum adanya pagar di bagian belakang.
- c. Belum tersedianya kendaraan operasional bagi eselon 3 dan eselon 4.
- b. Masih kurangnya kendaraan operasional pada UPTD seperti mobil jenazah dan mobil ambulan.
- c. Rusaknya mobil ambulan, sehingga pelayan bagi lansia yang sakit sangat terganggu.



Tabel 2.13
Data sarana dan prasarana Dinas Sosial Prov. Kaltara

No	Uraian/ Barang	Merk	Tahun Perolehan	Jml	Perolehan barang	Status barang	Kondisi barang
1	Mesin Ketik	Olimpia	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
2	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Filling Kabinet)	-	2018	2	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
3	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Arsip)	-	2018	4	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
4	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Brangkas)	Kafele	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
5	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Kayu)	-	2018	5	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
6	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Rak Koran)	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
7	Alat Kantor Lainnya (Alat Penghancur Kertas)	Dahle	2018	2	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
8	Alat Kantor Lainnya (GPS)	Garmin	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
9	Alat Pendingin (Lemari Es)	Samsung	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
10	Alat Pendingin (AC)	LG	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
11	Alat Rumah Tangga Lainnya (Televisi)	Samsung	2018	2	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
12	Alat Rumah Tangga Lainnya (Sarana Akses Bagi Disabilitas/ Pagar)	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
13	Komputer PC	HP	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik



14	Laptop	HP	2018	8	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
15	Printer	Epson	2018	4	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
16	Meja Kerja	-	2018	15	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
17	Meja Pejabat Eselon 2	Frontline	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
18	Meja Rapat	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
19	Kursi Kerja	-	2018	17	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
20	Kursi Tamu	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
21	Peralatan Studio Visual (Kamera)	Canon & Fujifilm	2018	2	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
22	Alat Komunikasi (Telephone)	Panasonic	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
23	Software (Website)	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
24	AC Central	Polytron & Gree	2018	2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Aset Dinas Sosial	Baik
25	AC Split	Samsung	2018	4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Aset Dinas Sosial	Baik
26	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Arsip)	-	2017	3	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
27	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Filling Kabinet)	-	2017	2	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
28	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Rak Piring)	-	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dispenser)	Sanken	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
30	Pengadaan Personal Komputer (Komputer)	Asus	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
		Asus	2017	4	Pembelian APBD	Aset Dinas	Baik



					2017	Sosial	
31	Pengadaan Personal Komputer Laptop	Asus	2017	5	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
32	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (CCTV)		2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
33	Peralatan Perlengkapan Kantor (Printer)	EPSON	2017	2	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
		EPSON	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
34	Peralatan Perlengkapan Kantor (Wireless)	YTS	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
35	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Brankas)	Sentry Safe	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
36	Pengadaan Alat Studio (Microfon)		2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
37	Pengadaan Alat Studio (Proyektor dan layar)	Epson	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
38	Scaner	EPSON	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
39	Gorden		2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
40	Mobil Inova (pembagian dari Biro Umum)	Inova	2017	1	Pembagian dari Biro Umum	Pinjam Pakai	Baik
41	Mobil Operasional	Hilux	2017	1	Pembelian APBDP 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
42	Meja Kayu	-	2017	5	Dinas PU-PR	Pinjam Pakai	Rusak Ringan
43	Kursi Kayu	-	2017	7	Dinas PU-PR	Pinjam Pakai	Rusak Ringan
44	Meja Kerja Biro	Pro Design	2017	1	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
45	Meja Kerja 1/2 Biro	Activ	2017	3	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
46	Meja Kerja 1/2 Biro	-	2017	8	Biro Kesra	Pinjam Pakai	2 Rusak Ringan
47	Kursi Kerja	Chitose	2017	6	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
48	Kursi Kerja	Malvin	2017	3	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
49	Mobil Dapur Lapangan	Mitsubishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik



50	Mobil Rescue	Mitsubishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
51	Truk	Mitsubishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
52	Mobil Tangki Air	Mitsubishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
53	Motor Lapangan	Kawasaki	2015	2	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik

(Sumber : Laporan Pengurus Barang pe 31 Desember 2018)



Tabel 2.14
Data sarana dan prasarana UPT Panti Sosial Tresna Werdha
Marga Rahayu Prov. Kaltara

No	Uraian/ Barang	Merk	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Kondisi barang
1	Kendaraan Roda 4	Kijang Inova	Aset dari Kaltim	1	Baik
2	Kendaraan Roda 4	Mitsubishi L300	Aset dari Kaltim	1	Rusak Berat
3	Kendaraan Roda 4	Ambulance Hiluc	Aset dari Kaltim	1	Rusak Ringan
2	Kendaraan Roda 2	Yamaha Jupiter	Aset dari Kaltim	2	Baik
3	CCTV	Nathan's	2018	1	Baik
4	Sound Sistem	Auder	2018	1	Baik
5	Penghancur Kertas	Secure	2018	1	Baik
6	Laptop	HP	2018	2	Baik
7	Printer	Epson	2018	2	Baik
8	Kursi Makan Lansia Kayu	-	2018	1	Baik
9	Meja Makan Lansia Kayu	-	2018	1	Baik
10	Lemari Arsip	Emporium	2018	2	Baik
11	Pemanas Air	Ariston	2018	2	Baik
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (kompor Gas)	Butterfly	2015	2	Baik
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dispenser)	Miyako	2015	2	Baik
14	Peralatan perlengkapan kantor (Mesin Absensi)	Fingerspot Preminer	2016	1	Baik
15	Peralatan Perlengkapan Kantor (Scanner)	Canoscan	2016	1	Baik
16	Pengadaan Personal Komputer (Laptop)	Asus	2016	2	Baik
		Toshiba	2016	1	Baik
17	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Mimbar/Podium)		2016	1	Baik
18	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Spring Bad)	Central Deluxe	2017	33	Baik
19	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Spray dan Bantal)	Lokal	2017	33	Baik
		Central	2017	33	Baik
20	Pengadaan Alat Rumah Tangga		2017	3	Baik



21	Lainnya (Ambal dan Lukisan)	lokal	2017	5	Baik
22	Tanah bangunan kantor pemerintahan		1986	1	Baik
23			1996	1	Baik
24	Bangunan Gedung Permanen		1999	1	Baik
25	Bangunan Gedung Tempat Ibadah		2010	1	Baik
26	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1999	1	Baik
27	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		1999	1	Baik
28	Bangunan Gedung Tempat Pos Jaga		2013	1	Baik
29	Bangunan Gedung Tempat kerja/ Kantor		2009	1	Baik

(sumber : Laporan Pengurus Barang pe 31 Desember 2018)



6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Berdasarkan hasil laporan realisasi anggaran Belanja Langsung APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018 mencapai realisasi keuangan sebesar 78,47% dan realisasi fisik sebesar 88,44% dan realisasi Belanja Langsung UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu sebesar 82,73% dan realisasi fisik 99,21%. Realisasi anggaran dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara belum maksimal, adapun beberapa kendalanya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal tidak dapat terlaksana dikarenakan tidak adanya data anak terlantar;
2. Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma tidak dapat terlaksana dikarenakan kekhawatiran dari orang tua untuk mengizinkan anaknya mengikuti pelatihan selama satu bulan dan ada anak yang sudah melebihi batas umur (18th) yang tidak lagi dikategorikan dalam anak dibawah umur;
3. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS



tidak dapat terlaksana karena keterlambatan instansi lain (pihak Kabupaten) menutup lokalisasi;

4. Dalam kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak dana yang tersedia merupakan dana *stand by*, kegiatan dapat terlaksana jika ada permasalahan terkait;
5. Pada kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa masih dalam proses pencarian ke masing-masing rekening relawan Tagana dan sebagian dana yang tersedia merupakan dana *stand by*, kegiatan dapat terlaksana jika ada permasalahan terkait;
6. Pemulangan PMKS sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun dikarenakan jumlah PMKS yang akan dipulangkan tidak dapat diprediksi, maka masih tersisanya anggaran pemulangan PMKS
7. Lambatnya pencairan honor Tagana di karenakan lambatnya pengumpulan kelengkapan administrasi dan laporan dari anggota Tagana.
8. Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun dikarenakan jumlah PMB yang akan dipulangkan tidak dapat diprediksi, maka masih tersisanya anggaran pemulangan PMB.



b. Solusi

Beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya realisasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dapat ditindaklanjuti dengan beberapa solusi penyelesaiannya untuk memperbaiki kinerja SKPD pada Tahun berikutnya diantaranya:

- a. Memperbaiki sistem perencanaan terutama dalam penyusunan RKA.
- b. Meningkatkan kapasitas ASN dengan mengikuti pelatihan yang sesuai dengan tupoksi SKPD.
- c. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan SKPD/Instansi lainnya.
- d. Membangun kerjasama yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta membangun semangat kebersamaan dalam mencapai target SKPD.
- e. Meningkatkan pelayanan cepat tanggap darurat agar korban bencana dapat tertangani lebih baik lagi
- f. Menghimbaukan untuk Tagana dapat mempercepat pelaporan pelaksanaan kegiatan per triwulan.
- g. Menambah jumlah personil tim reaksi cepat bencana memberikan pelatihan penguatan kapasitas SDM Tagana

